

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Partai Politik*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, LN RI Tahun 2011.

_____. *Undang-Undang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001.

_____. *Undang-Undang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015.

_____. *Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum dan HAM*, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017.

B. Buku

Encup Supriatna. *Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara*.

Extrix, *Trias Politica, Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara*, (Jakarta: Guepedia, 2020).

Firmanzah. *Mengelola Partai politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Jurdi Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Lutfi Effendi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004).

Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Muhtar Haboddin. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Brawijaya Presss, 2016).

Rachman Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014).

C. Lain-lain

Administrator, *Sejarah Kementerian Hukum dan HAM*, tanggal 08 September 2016 tersedia di <https://kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

Herdianto Aryo Wirro Bimo, "Upaya Hukum Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penetapan Partai Politik" *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXII No. 2, 2018, tersedia di <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/33/30>.

Kanwil NTT, Partai Politik Sebagai Badan Hukum, Apabila Terdaftar di Kemenkumham RI Sesuai Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tersedia di <https://ntt.kemenkumham.go.id>

Kementerian, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, tersedia di <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 02 Juni 2022.

Kongres Advokat Indonesia, "Melihat Wewenang Menkumham dalam Pengesahan Kepengurusan Parpol", tersedia di <https://www.kai.or.id/berita/18702/melihat-wewenang-menkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol.html>.

Kurniawan Nalom dan Firdaus, *Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, *Jurnal Konstitusi*, tersedia di <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1439>.

Erlangga Permana, Angkatan Muda Partai Golkar Ketua Umum di Kota Bogor

Rakha Fahreza Widyananda, 7 Tujuan Partai Politik Menurut UU di Indonesia dan Kewajibannya, tersedia di <https://www.merdeka.com/jatim/7-tujuan-partai-politik-menurut-uu-di-indonesia-dan-kewajibannya-anda-wajib-tahu-klm.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Berencana Dalam Pengujian Undang-Undang", (Jakarta, 2016), *Jurnal* Vo. 13 No. 02, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

Sejarah Kemenkumham, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, tersedia di <https://www.kemenkumham.go.id> diakses 8 September 2016.